

**PENGARUH BELANJA MODAL DAERAH DAN TINGKAT
KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : NURUL ALAM NS RAMBE

NPM : 1705170060

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NURUL ALAM NS RAMBE
NPM : 1705170060
Program Studi : AKUNTANSI
Kosentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH BELANJA MODAL DAERAH DAN TINGKAT KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SUKMA LESMANA, SE., M.Si)

Penguji II

(MUHAMMAD SHAREZA HAFIZ, SE., M.Acc)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, SE., M.Si., AK., CA)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NURUL ALAM NS RAMBE

N.P.M : 1705170060

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : PENGARUH BELANJA MODAL DAERAH DAN TINGKAT
KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2022

Pembimbing Skripsi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. HANUM SARI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurul Alam Ns Rambe
NPM : 1705170060
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Belanja Modal Daerah Dan Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	-Tahun pada judul dihapus. - Tambahkan tahun penelitian	13/juli 2021	
Bab 2	- Tambahkan teori yang mendukung variabel dan gunakan referensi 5 tahun terakhir - Tambahkan penelitian terdahulu	24/juli 2021	
Bab 3	- Jelaskan indikator variabel pada definisi operasional - Jelaskan jumlah populasi dan sampel (jelaskan) - Daftar pustaka tambahkan referensi.	11/Agus 2021	
Bab 4	- Pada deskripsi data tambahkan penjelasan - Tambahkan rumus penjelasan pada variabel penelitian	16/maret 2022	
Bab 5			
Daftar Pustaka	- gunakan mendeley.	16/maret 2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau		22/maret 2022	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 22 Maret 2022
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NURUL ALAM NS RAMBE

NPM : 1705170060

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Belanja Modal Daerah Dan tingkat Kekayaan daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



NURUL ALAM NS RAMBE

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA MODAL DAERAH DAN TINGKAT KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh

**NURUL ALAM NS RAMBE
1705170060**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal dan tingkat kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara, baik itu secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh antara Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019. Ada pengaruh antara Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019. Ada pengaruh antara Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019. Nilai *R-Square* diatas adalah sebesar 65,3 % hal ini berarti bahwa 65,3 % variasi nilai Pendapatan Asli Daerah ditentukan oleh peran dari variasi nilai Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah. Dengan kata lain Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah sebesar 65,3% sedangkan sisanya 34,7% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti dana alokasi khusus, pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya.

Kata Kunci: Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL CAPITAL EXPENDITURE AND REGIONAL WEALTH LEVELS ON REGIONAL ORIGINAL INCOME NORTH SUMATRA PROVINCE

By

**NURUL ALAM NS RAMBE
1705170060**

The purpose of this study was to examine and analyze the effect of capital expenditures and the level of regional wealth on the original regional income of North Sumatra Province, either partially or simultaneously. This study uses a quantitative approach. The analysis technique used in this research is multiple linear analysis technique. The results of the study show that there is an influence between Capital Expenditure on Regional Original Income at the City Government in North Sumatra Province for the 2017-2019 period. There is an influence between the Regional Wealth Level on the Regional Original Income in the City Government in North Sumatra Province for the 2017-2019 period. There is an influence between Capital Expenditure and Regional Wealth Level on Regional Original Income in City Governments in North Sumatra Province for the 2017-2019 Period. The value of R-Square above is 65.3%, this means that 65.3% of the variation in the value of Regional Original Income is determined by the role of variations in the value of Capital Expenditures and the Level of Regional Wealth. In other words, Capital Expenditures and Regional Wealth Levels in influencing regional original income are 65.3% while the remaining 34.7% is influenced by other variables not included in this study such as special allocation funds, regional taxes, regional levies and others.

Keywords: Capital Expenditure, Regional Wealth Level and Regional Original Income

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT karena berkah, rahmat dan karunian-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah tercinta dan Bunda yang kusayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Januri S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si, selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh pegawai dan staff administrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kedua orang tua saya, Harmayadi Rambe dan Khairul Bariah, serta adik-adik saya Fittiyatur Rasyid AR, Fatiya Aksari Rezeky Rambe dan Mahira Syakila Rambe yang selalu mendukung saya dalam penulisan skripsi ini dan seluruh keluarga besar saya.
11. Kepada Astina Anggraini Tarigan dan teman-teman mulai dari kecil hingga saat ini, yang selalu memberikan motivasi tiada tara untuk penyusunan skripsi ini.

12. Kepada Sri Dwiyanti dan Annisyah Putri Dulay serta Teman-teman seperjuangan “Wisuda Bareng 2021” yang selalu memberikan motivasi untuk segala hal nya.
13. Kepada Fariha Mahzula, Nanda Putri Ranggalayoni dan Ira Wahyuni selaku teman sekaligus keluarga yang selalu membantu dalam memberikan dukungan dan motivasi nya.
14. Seluruh teman-teman se-angkatan program studi akuntansi angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat.
15. Dan seluruh teman-teman lain yang mendukung dan memberikan motivasinya hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna, baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Skripsi ini.

Amin YaRabbal’alamin.

Medan, Maret 2022

Penulis

Nurul Alam Ns Rambe
1705170060

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Berfikir.....	23
2.4 Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Definisi Operasional.....	26
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.2 Pembahasan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Belanja Modal Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	3
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional Variabel	30
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	33
Tabel 4.1 Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah dan Pendapatan Asli Dearah ...	40
Tabel 4.2 Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah dan Pendapatan Asli Dearah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018	42
Tabel 4.3 Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah dan Pendapatan Asli Dearah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019	44
Tabel 4.4 Descriptive Statistics.....	46
Tabel 4.5 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4.7 Hasil Regresi Linier Berganda	51
Tabel 4.8 Hasil Uji t (Parsial)	52
Tabel 4.9 Hasil Uji- F (Simultan)	54
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	25
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	50
Gambar 4.2 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dinamakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik (Tahar & Zakhiya, 2011). Pelaksanaan Otonomi Daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila (Mardiasmo, 2006:86):

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Pemerintah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik bagi daerahnya. Salah satu PAD yang diperoleh adalah melalui pengelolaan tingkat kekayaan daerah. Dimana PAD akan menjadi tulang punggung untuk membiayai belanja modal daerah tersebut. PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang memiliki positif (Mayasari et al., 2014).

Belanja modal daerah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap daerah. Asset tetap tersebut dapat berupa fasilitas sarana prasarana serta infrastruktur dengan tujuan menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan investasi dan akan meningkatkan PAD (Suwandi & Tahar, 2016).

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan asset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian.

Asset tetap tersebut di danai dari pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian terdahulu oleh Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Rizanda (2013) dan Paujiah (2012) memperoleh hasil bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penulis dalam penelitian ini mengubah variable x berpengaruh terhadap y, yaitu belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Greg & Anggana, 2016).

Berdasarkan penelitian dapat ditemukan fenomena mengenai belanja modal daerah dengan pendapatan asli daerah pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Belanja Modal Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Belanja Modal Daerah	Pendapatan Asli Daerah
2017	10.887.110.458.913	10.732.002.100.318
2018	9.626.081.172.261	10.800.051.128.124
2019	9.604.460.141.357	11.312.405.397.369

Sumber: DJPK Kemenkeu (Data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel diatas ditemukan dapat dilihat bahwa belanja modal 3 tahun terakhir mengalami penurunan namun PAD mengalami peningkatan. Hal tersebut juga bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Sudarsana et al (2013) yang menyatakan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun, sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

hal ini telah terjadi di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki infrastruktur kurang memadai sedangkan PAD setiap tahun terus mengalami peningkatan.

Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Sumber kekayaan daerah yang utama yaitu Pendapatan Asli Daerah. PAD digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (Halachmi, 2005). Tingkat kekayaan daerah dengan diberlakukannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi guna memperoleh PAD yang tinggi. PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sehingga memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.

Kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat dilihat dari PAD yang merupakan sumber utama dalam melaksanakan otonomi daerah. Setiap daerah berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada pada setiap daerahnya agar PAD yang didapat meningkat. Penelitian sebelumnya menggunakan variable tingkat kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel kekayaan daerah untuk menilai pengaruhnya terhadap kinerja keuangan adalah (Reny Retnowati, 2016),

(Pratama et al., 2015), (Minarsih, 2015), dan (Kusumawardani, 2012). Penelitian saat ini oleh penulis mengubah variable y menjadi PAD, sehingga menghasilkan penelitian tingkat kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Modal Daerah dan Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara “

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Belanja daerah Provinsi Sumatera Utara dalam kurun 3 tahun terakhir mengalami penurunan.
2. Dengan menurunnya belanja daerah maka infrastruktur dan prasarana tidak mengalami perkembangan,
3. Pendapatan Asli daerah Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 mengalami peningkatan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah belanja modal daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Utara tahun 2015-2019?
2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Utara tahun 2015-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah belanja modal daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memahami teori belanja modal daerah dan tingkat kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah.

2. Bagi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan judul/kajian yang diteliti.

3. Bagi Universitas dan Pihak Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama mahasiswa yang melakukan penelitian yang berkaitan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 tertulis: Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Rori et al., 2016) PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Anggoro & Alfandia, 2018) pendapatan asli daerah (PAD) adalah PAD merupakan bentuk kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dalam suatu daerah berdasarkan peraturan masing-masing daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Siregar, 2017) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku.

A. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

1) Pajak daerah

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut (Halim, 2016), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan di suatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak.

Menurut Adriani, pajak objektif dilihat pada objeknya (benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak) kemudian baru dicari subjeknya baik yang berkewajiban di Indonesia maupun tidak. Golongan pajak objektif diantaranya: (a) Pajak

yang dipungut karena keadaandiantaranya pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak karena menggunakan bendayang kena pajak; (b) Pajak yang dipungut karena perbuatan diantaranya pajak lalulintas kekayaan, pajak lalu lintas hukum, pajak lalu lintas barang, serta pajak ataspemakaian; (c) Pajak yang dipungut karena peristiwa diantaranya bea pemindahandi Indonesia contohnya pemindahan harta warisan.

Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UURI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(Halim, 2016), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari:

1) Jasa Umum

Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

potensial dan pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis Retribusi tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-cuma.

2) Jasa Usaha

Pada Pasal 126 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi

tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Retribusi Perizinan

Tertentu Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

B. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut (Halim, 2016), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyekpendapatan mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.

3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Menurut (Halim, 2016), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) bagian laba perusahaan milik daerah,
- 2) bagian laba lembaga keuangan bank,
- 3) bagian laba lembaga keuangan non bank,
- 4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

Dalam (Mardiasmo, 2019), pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung otonomi daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD pada PAD dapat menjadi indikator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah.

C. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut (Halim, 2016), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,

retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 8) Pendapatan denda pajak.
- 8) Pendapatan denda retribusi.
- 9) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 10) Pendapatan dari pengembalian.
- 11) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 12) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
- 13) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

D. Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dari sisi perundang-undangan, peluang ke arah peningkatan PAD terbuka melalui peningkatan tarif maupun perluasan pajak daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 undangundang ini memberikeleluasaan untuk menambah jenis-jenis pajak baru dengan kriteria:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- 2) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat.
- 5) Potensinya memadai.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut (Mardiasmo, 2019), otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang akan terbebani. Maksimalisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut. Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak, jika mau menambah hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *the last effort* saja.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 7 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) adalah kenaikan pendapatan yang diperoleh pada tahun berikutnya dari sumber-sumber pendapatan daerah. PPAD dilihat pada tahun kesatu (lag satu tahun), tahun kedua (lag dua tahun) dan tahun ketiga (lag tiga tahun). Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, agar tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *lawenforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

2.1.2 Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). Menurut

Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (Abdullah 2004). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber penerimaan daerah ini digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah (Hempri,2017). Tingkat kekayaan daerah ini diproksikan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibandingkan dengan total pendapatan (Artha et al., 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD

lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Andrani & Wahid, 2018).

Menurut Andrani & Wahid (2018) dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Adi (2006) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik, dimana kualitas layanan publik yang baik terhadap masyarakat (*principal*) akan mencerminkan kinerja yang baik dari suatu Pemda (*agent*).

2.1.3 Belanja Modal Daerah

PSAP No 2 PP No 71 Tahun 2010 belanja daerah merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Menurut Abdul Halim [2] Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai ekayaan bersih dalam periode anggaran.

Menurut Suminto (2004:27) dalam Rizal & Erpita (2019), belanja untuk daerah adalah belanja untuk menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, Belanja terdiri dari:

- a. Belanja Aparatur Daerah,
- b. Belanja Pelayanan Publik,
- c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan
- d. Belanja Tidak Tersangka.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila (Mardiasmo, 2006:86):

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas,

- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah,
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Dalam SAP, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama, diantaranya adalah :

- a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang berhubungan dengan aset fisik atau aset berwujud berupa tanah termasuk pengeluaran untuk pembelian, pengadaan, pembebasan, balik nama dan sewa, pengosongan, perataan, pematangan, pembuatan dokumen sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan atas hak perolehan tanah dan sampai kondisi tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian atau pengadaan, penambahan, perawatan gedung yang mempunyai umur efisiensi dalam jangka waktu yang lama.

- d. Belanja Modal Jalan, Irigrasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigrasi, dan Jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ pengantian/ peningkatan, pembangunan atau pembuatan serta perawatan yang menambah.

e. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran selain belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. seperti kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil penelitian
Reny Retnowati (2016)	Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Modal Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen : Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage dan Intergovernmental Revenue Variabel Dependen : Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah dan ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tingkat kekayaan daerah, leverage, dan intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Ervin Dela Dwiyanti (2019)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel	Variabel Independen : Belanja Modal Variabel Dependen :	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli

	Intervening Pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tahun 2016	Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening	Daerah, Dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan 10 Asli Daerah sebagai variabel intervening.
Yusuf Hafandi & Romadhon (2020)	Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo	Variabel Independen : Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah	Penelitian ini untuk membuktikan bahwa pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Wonosobo
Akhmad Imam Amrozi (2016)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)	Variabel Independen : Belanja Modal Variabel Dependen : Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (rasio kemandirian), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (kemampuan mobilisasi daerah), Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan

			(efisiensi pengeluaran anggaran), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (sisa pengeluaran anggaran), Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.
--	--	--	---

2.3 Kerangka Berfikir

2.3.1 Pengaruh Belanja Modal Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Belanja modal daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin (Pratiwi & Arifin, 2018). Menurut Nugroho & Rohman (2012) pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal daerah sangat erat kaitanya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta berpengaruh dengan pendapatan asli daerah tersebut. Belanja modal daerah yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2.3.2 Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah PAD (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). Adapun pertimbangan tingkat kekayaan diukur dengan PAD karena merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari pengelolaan sumber daya pada daerah tersebut. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Darwanis & Saputra, 2014).

Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD.

Hipotesis 2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

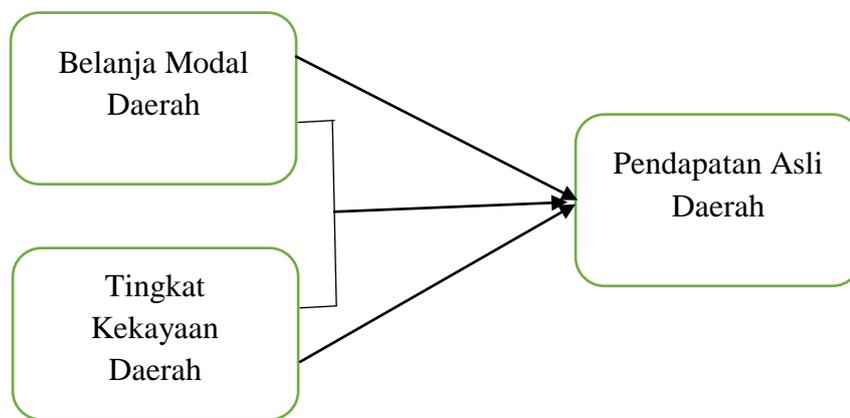
2.3.3 Pengaruh Belanja Modal Daerah dan Tingkat Kekayaan Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka pembangunan daerah belanja modal pada akan dialokasikan untuk perolehan aset tetap. Dimana dalam pengalokasiannya akan saling mempengaruhi pendapatan asli daerah tersebut. Dalam memperoleh aset tetap tersebut pemerintah daerah menyesuaikan belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Tingkat kekayaan daerah juga akan memberikan sisi yang

berkesinambungan dalam perolehan asset tetap terhadap pendapatan asli daerah dan akan saling mempengaruhi belanja modal daerah tersebut. Dalam mencapai pendapatan asli daerah yang memadai, agar di olah tingkat kekayaan daerah tersebut juga. Sehingga dalam penelitian ini diperoleh:

Hipotesis 3: belanja modal daerah dan tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir konseptual, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Belanja modal daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019.
2. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019.
3. Belanja modal daerah dan tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap pendapatn asli daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi non partisipan. Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini diukur dengan jumlah seluruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diperoleh suatu daerah

3.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi defenisi operasional dalam penelitian ini meliputi:

A. Belanja Modal (X1)

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, jogging track, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar (Aditya et al., 2018). Namun, tidak selalu belanja modal berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Beberapa proyek fisik menghasilkan output berupa

bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur (birokrasi) atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik (Jaeni, 2016)

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Pengukuran variabel Belanja Modal ini diukur dengan skala rasio. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan :

$$BM = BT + BPM + BGB + BJII$$

Dimana :

BM : Belanja Modal

BT : Belanja Tanah

BPM : Belanja Peralatan dan Mesin

BGB : Belanja Gedung dan Banguna

BJII : Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

B. Tingkat Kekayaan Daerah (X2)

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (Abdullah 2004). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber

penerimaan daerah ini digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah (Hempri, 2017). Tingkat kekayaan daerah ini diprosikan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibandingkan dengan total pendapatan (Artha et al., 2016). Penelitian ini menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah.

$$\text{Tingkat Kekayaan Daerah} = \frac{PAD}{\text{total Pendapatan}}$$

C. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut (Siskawati, 2014, Hal. 198). Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah pada APBD, semakin besar sumbangan yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah pada APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Fawaidurrohman et al., 2019, Hal. 91).

Menurut (Yusuf et al., 2014), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah, namun proporsi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintahan daerah diharapkan lebih mampu mengali sumber-sumber keuangan secara maksimal. Namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan asli daerah. Tuntutan Peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil

ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. Menurut (Pratama, 2013) PAD dapat diukur dengan perhitungan:

$$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$$

Dimana :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PPD : Pendapatan Pajak Daerah

PRD : Pendapatan Retribusi Daerah

LPS : Lain-lain PAD yang dipisahkan

HPKDD : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang	$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$ (Pratama, 2013)	Rasio

	<p>dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Wulandari& Iryanie, 2018, Hal. 23)</p>		
Belanja modal	<p>belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode</p>	<p>$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ$ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010)</p>	Rasio

	<p>akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010)</p>		
<p>Tingkat kekayaan daerah</p>	<p>Pertumbuhan perusahaan diprosikan dengan tingkat penjualan pada suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat penjualan perusahaan tersebut maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan <i>voluntary auditor switching</i> (Faradila & Yahya, 2016).</p>	<p><i>Tingkat Kekayaan Daerah</i></p> $= \frac{PAD}{total\ Pendapatan}$ <p>(Hempri, 2017).</p>	<p>Rasio</p>

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara yang tercatat pada laporan APBD melalui situs resmi DJPK Kemenkeu yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari s/d Juli 2021. Berikut ini merupakan tabel waktu penelitian:

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■	■																				
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal													■	■	■	■								
4	Seminar Proposal																					■			
5	Penyusunan Skripsi																						■		
6	Bimbingan Skripsi																						■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																								■

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Arikunto (2013: 173), populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan populasi berupa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 daerah yang terdiri dari 8 Kota dan 25 Kabupaten.

Arikunto (2013: 174), menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Proses pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengolah data dari data sekunder.

A. Populasi

Penelitian ini menggunakan populasi berupa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 daerah yang terdiri dari 8 Kota dan 25 Kabupaten, yang terdiri dari :

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Asahan
2	Kabupaten Batu Bara
3	Kabupaten Dairi
4	Kabupaten Deli Serdang
5	Kabupaten Humbang Hasundutan
6	Kabupaten Karo
7	Kabupaten Labuhanbatu
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara
10	Kabupaten Langkat
11	Kabupaten Mandailing Natal
12	Kabupaten Nias
13	Kabupaten Nias Barat
14	Kabupaten Nias Selatan
15	Kabupaten Nias Utara
16	Kabupaten Padang Lawas
17	Kabupaten Padang Lawas Utara
18	Kabupaten Pakpak Bharat
19	Kabupaten Samosir
20	Kabupaten Serdang Bedagai
21	Kabupaten Simalungun
22	Kabupaten Tapanuli Selatan
23	Kabupaten Tapanuli Tengah
24	Kabupaten Tapanuli Utara
25	Kabupaten Toba Samosir
26	Kota Binjai
27	Kota Gunungsitoli
28	Kota Medan
29	Kota Padang Sidempuan

30	Kota Pematang Siantar
31	Kota Sibolga
32	Kota Tanjung Balai
33	Kota Tebing Tinggi

B. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah yang berjumlah 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah metode dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengolah data dari data sekunder.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengolah data dari sumber data sekunder berupa laporan realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh melalui situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (www.djpkpd.go.id).

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan serta mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi seluruh variabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z* (1-Sample KS).

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah adakorelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Dasar pengambilankeputusannya adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factory*) dan nilai *tolerance* mendekati satu. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 . Model regresi yang baik tidak adanya gejala multikolinieritas.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi linear terdapat kolerasi antara residual pada periode t (saat ini) dengan residual periode $t-1$ (sebelumnya). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai D-W dibawah -2 , berarti ada autokorelasi positif.
2. Jika nilai D-W diantara -2 sampai $+2$, berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai D-W diatas $+2$, berarti ada autokorelasi positif atau negatif.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk meramalkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penggunaan analisis regresi harus bebas dari uji asumsi klasik. Berikut persamaan yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	=	Variabel Dependen (Pendapatan Asli Daerah)
a	=	Konstanta
b ₁ b ₂ b ₃	=	Koefisien regresi
X ₁	=	Belanja Modal Daerah
X ₂	=	Tingkat Kekayaan Daerah
e	=	Error

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji t (uji Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan :

1. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel Apabila t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Apabila t hitung > t tabel maka hipotesis diterima.

2. Dengan melihat nilai probabilitas signifikan Apabila nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

3.6.4.2 Uji F (uji Simultan)

Dalam penelitian ini, uji nilai F digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai sig $< 0,05$ maka variabel dependen secara simultan dipengaruhi oleh variabel independen.

3.6.5 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil memberikan gambaran bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Variabel Penelitian

1) Pendapatan Asli Daerah (Y)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain- lain PAD yang sah.

2) Belanja Modal (X1)

Belanja modal adalah salah satu kunci utama agar suatu badan atau institusi bisa memperoleh aset tetap dengan cara membeli. Selain itu, Belanja modal adalah hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Manfaatnya akan bisa dirasakan hingga satu tahun anggaran lebih setelah dilakukannya pengeluaran.

Rumus menghitung belanja modal sebagai berikut :

Belanja modal = Kenaikan bersih dalam aset tetap + Beban penyusutan. Kenaikan bersih aset tetap = Aset tetap pada akhir tahun – Aset tetap pada awal tahun.

3) Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah.

Kekayaan daerah yang dimiliki oleh suatu daerah harus dimanfaatkan

dengan baik oleh daerah untuk meningkatkan pelayanan, sarana, dan prasarana publik, karena untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka harus didukung dengan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.

Pengukuran variabel dilihat pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kekayaan Daerah} = \text{Ln} (\text{Total aset})$$

4.1.2 Deskripsi Data

Didalam penelitian ini variabel-variabel penelitian di klasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah sedangkan variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam perhitungan variabel penelitian ini diperoleh dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.

Berikut ini disajikan tabulasi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

No.	Daerah	Belanja Modal	Tingkat Kekayaan Daerah	PAD
1.	Kab. Asahan	350,146,028,220	9,146,601,279	123,687,304,879
2.	Kab. Dairi	260,705,968,964	10,779,522,587	128,489,751,332
3.	Kab. Deli Serdang	741,456,897,033	20,064,116,991	849,286,151,151
4.	Kab. Karo	335,935,240,977	1,858,953,256	157,866,720,976
5.	Kab. Labuhanbatu	277,921,020,653	11,988,317,788	124,674,017,375
6.	Kab. Langkat	492,637,835,308	6,953,913,846	139,717,647,855
7.	Kab. Mandailing Natal	251,821,891,758	9,527,118,956	80,581,688,937

8.	Kab. Nias	239,523,860,631	10,780,869,649	95,726,167,744
9.	Kab. Simalungun	293,713,450,618	24,093,355,940	252,663,015,527
10	Kab. Tapanuli Selatan	277,231,852,741	51,223,145,325	104,722,613,705
11	Kab. Tapanuli Tengah	167,521,314,403	10,670,343,363	72,710,308,591
12	Kab. Tapanuli Utara	155,844,953,910	8,548,722,253	162,441,906,093
13	Kab. Toba Samosir	199,230,031,160	4,817,211,743	54,840,823,646
14	Kota Binjai	154,059,962,294	3,385,642,489	39,217,621,697
15	Kota Medan	997,475,991,902	11,095,561,295	1,739,756,922,634
16	Kota Pematang Siantar	262,835,986,784	10,162,494,442	105,445,993,204
17	Kota Sibolga	124,824,374,937	13,367,390,081	103,672,203,938
18	Kota Tanjung Balai	124,950,579,564	4,594,848,027	65,108,266,616
19	Kota Tebing Tinggi	184,156,162,478	8,257,483,813	113,222,874,687
20	Kota Padang Sidempuan	184,093,967,563	16,877,726,952	109,640,419,281
21	Kab. Pakpak Bharat	138,363,427,367	1,679,823,768	29,320,487,447
22	Kab. Nias Selatan	187,946,733,162	1,982,256,772	18,450,266,700
23	Kab. Humbang Hasundutan	224,702,953,707	5,817,060,834	85,598,357,027
24	Kab. Serdang Bedagai	238,604,911,311	4,254,251,564	103,711,290,229
25	Kab. Samosir	224,240,859,127	3,269,597,083	72,228,748,255
26	Kab. Batubara	164,420,002,646	3,102,482,560	66,944,796,374
27	Kab. Padang Lawas	221,963,650,130	2,886,630,438	46,509,729,525
28	Kab. Padang Lawas Utara	312,571,172,200	804,492,343	74,524,919,693
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	273,152,742,668	751,245,861	84,964,450,592
30	Kab. Labuhanbatu Utara	204,563,138,008	1,473,679,216	52,690,086,354
31	Kab. Nias Utara	251,675,869,175	675,436,307	20,107,246,943
32	Kab. Nias Barat	199,747,992,746	736,839,608	36,239,996,548
33	Kota Gunungsitoli	249,617,598,853	756,124,525	29,769,903,264

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara paling tinggi adalah Kota Medan sebesar Rp. 997,475,991,902 dan terendah adalah Kota Sibolga dimana belanja modal sebesar 124,824,374,937. Naik turunnya anggaran belanja modal dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai. Dengan kata lain, tidak sinkronnya pendapatan dengan belanja modal. Terlebih lagi rendahnya penyerapan OPD sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

Sedangkan Tingkat Kekayaan Daerah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara paling tinggi adalah Kabupaten Tapanuli Selatan dan yang Terendah adalah Kabupaten Nias Barat sebesar Rp. 736,839,608. Penurunan Tingkat Kekayaan Daerah disebabkan oleh laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/pemerintah mengalami penurunan.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang tertinggi adalah Kota Medan yaitu Rp. 1,739,756,922,634 dan yang Terendah adalah Kota Gunungsitoli sebesar Rp 29,769,903,264. Naik turunnya pendapat asli daerah dikarenakan penerimaan pajak dan daerah dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pengelolaan kota. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya penerimaan pajak dan retribusi pajak masing-masing daerah.

Tabel 4. 2 Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018

No.	Daerah	Belanja Modal	Tingkat Kekayaan Daerah	PAD
1.	Kab. Asahan	142,972,039,821	10,193,762,972	230,200,116,402
2.	Kab. Dairi	128,489,751,332	10,779,522,587	260,705,968,964
3.	Kab. Deli Serdang	729,648,594,489	35,636,472,727	670,584,193,041
4.	Kab. Karo	159,189,197,472	4,214,712,386	222,116,791,413
5.	Kab. Labuhanbatu	162,794,472,017	8,725,188,771	139,178,414,287
6.	Kab. Langkat	136,680,578,541	7,421,389,631	380,576,043,929
7.	Kab. Mandailing Natal	84,809,923,496	23,072,563,023	199,849,014,897
8.	Kab. Nias	88,754,606,115	11,688,732,720	207,016,876,763
9.	Kab. Simalungun	164,107,850,129	23,081,632,302	405,283,313,970
10	Kab. Tapanuli Selatan	140,044,217,234	65,698,866,718	363,140,233,295
11	Kab. Tapanuli Tengah	76,660,883,410	9,674,633,542	220,747,371,092
12	Kab. Tapanuli Utara	105,656,762,964	9,467,966,635	181,662,031,464
13	Kab. Toba Samosir	52,298,960,803	7,670,863,808	152,970,216,966
14	Kota Binjai	135,870,920,433	5,687,816,160	214,254,227,113
15	Kota Medan	1,636,204,514,684	11,901,953,037	753,996,886,210
16	Kota Pematang Siantar	113,424,719,193	11,209,961,923	287,958,994,695
17	Kota Sibolga	81,245,733,812	11,828,727,020	142,467,823,362

18	Kota Tanjung Balai	74,435,277,572	11,254,876,581	120,913,101,870
19	Kota Tebing Tinggi	114,048,354,143	13,598,925,485	203,340,069,233
20	Kota Padang Sidempuan	75,063,575,093	9,252,124,074	113,072,061,374
21	Kab. Pakpak Bharat	20,061,207,923	1,394,686,441	118,336,626,935
22	Kab. Nias Selatan	19,605,734,782	2,305,007,405	221,305,834,645
23	Kab. Humbang Hasundutan	92,735,853,813	4,829,657,117	168,860,963,829
24	Kab. Serdang Bedagai	194,382,972,213	5,332,917,666	349,104,338,217
25	Kab. Samosir	47,446,623,389	2,714,607,460	186,281,849,902
26	Kab. Batubara	64,385,292,862	2,124,584,211	139,977,493,680
27	Kab. Padang Lawas	47,455,308,607	2,807,390,794	204,458,003,516
28	Kab. Padang Lawas Utara	74,306,097,500	1,618,407,595	196,036,175,259
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	52,209,768,574	1,508,658,826	219,379,315,619
30	Kab. Labuhanbatu Utara	57,010,690,546	2,866,451,770	223,037,632,088
31	Kab. Nias Utara	50,395,504,636	1,940,688,174	192,092,726,869
32	Kab. Nias Barat	40,193,008,207	659,044,785	247,896,475,505
33	Kota Gunungsitoli	29,456,354,563	712,546,215	183,521,284,315

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 paling tinggi adalah Kota Medan sebesar Rp. 1,636,204,514,684 dan terendah adalah Kabupaten Nias Selatan dimana belanja modal sebesar 19,605,734,782. Naik turunnya anggaran belanja modal dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai. Dengan kata lain, tidak sinkronnya pendapatan dengan belanja modal. Terlebih lagi rendahnya penyerapan OPD sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

Sedangkan Tingkat Kekayaan Daerah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara paling tinggi adalah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu sebesar Rp. 65,698,866,718 dan yang Terendah adalah Kabupaten Nias Barat sebesar Rp. 659,044,785. Penurunan Tingkat Kekayaan Daerah disebabkan oleh laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/pemerintah mengalami penurunan.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang tertinggi adalah Kota Medan yaitu Rp. 753,996,886,210 dan yang Terendah adalah Kota Padang Sidempuan sebesar Rp 113,072,061,374. Naik turunnya pendapat asli daerah dikarenakan penerimaan pajak dan daerah dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pengelolaan kota. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya penerimaan pajak dan retribusi pajak masing-masing daerah.

Tabel 4.3 Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah dan Pendapatan Asli Dearah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019

No.	Daerah	Belanja Modal	Tingkat Kekayaan Daerah	PAD
1.	Kab. Asahan	149,647,050,442	8,685,771,397	304,478,575,305
2.	Kab. Dairi	74,360,339,718	6,770,706,298	197,567,865,963
3.	Kab. Deli Serdang	825,375,281,297	22,017,441,824	703,280,070,640
4.	Kab. Karo	117,683,657,833	2,429,190,829	196,427,858,444
5.	Kab. Labuhanbatu	175,335,685,317	16,226,589,877	238,729,009,917
6.	Kab. Langkat	167,523,076,880	6,307,629,896	346,035,976,277
7.	Kab. Mandailing Natal	98,758,815,328	7,668,519,667	206,392,843,128
8.	Kab. Nias	107,639,139,180	10,052,195,755	190,454,026,585
9.	Kab. Simalungun	191,940,130,095	19,088,536,501	381,344,591,277
10	Kab. Tapanuli Selatan	167,458,157,940	69,942,041,323	420,660,057,835
11	Kab. Tapanuli Tengah	88,441,123,323	11,965,468,472	219,450,399,720
12	Kab. Tapanuli Utara	113,990,759,582	8,024,092,439	194,947,102,075
13	Kab. Toba Samosir	68,046,526,605	7,619,329,178	135,339,350,834
14	Kota Binjai	108,954,526,370	3,400,955,458	127,213,320,411
15	Kota Medan	1,829,665,882,248	14,638,487,560	992,661,245,695
16	Kota Pematang Siantar	125,018,502,648	9,566,070,943	204,959,071,624
17	Kota Sibolga	69,312,217,832	6,797,264,219	81,569,259,159
18	Kota Tanjung Balai	63,721,315,845	7,206,780,460	96,299,502,046
19	Kota Tebing Tinggi	105,239,918,352	16,709,888,037	153,577,322,072
20	Kota Padang Sidempuan	87,432,283,185	17,389,342,764	137,812,393,424
21	Kab. Pakpak Bharat	33,915,957,645	1,256,033,085	145,937,021,774
22	Kab. Nias Selatan	25,664,883,761	7,384,538,798	238,978,343,319
23	Kab. Humbang Hasundutan	73,757,931,630	4,501,455,206	177,278,522,408
24	Kab. Serdang Bedagai	143,144,170,557	7,911,470,925	313,357,351,131
25	Kab. Samosir	60,497,449,963	4,533,993,582	164,093,834,379
26	Kab. Batubara	129,221,846,897	819,924,969	222,600,369,777
27	Kab. Padang Lawas	52,067,312,091	6,526,583,214	241,420,449,752
28	Kab. Padang Lawas Utara	42,929,111,658	1,584,303,006	247,484,629,027

29	Kab. Labuhanbatu Selatan	75,687,647,545	2,587,922,943	220,503,868,788
30	Kab. Labuhanbatu Utara	70,122,562,532	2,732,595,137	258,116,878,081
31	Kab. Nias Utara	57,961,363,630	1,494,496,730	258,215,519,657
32	Kab. Nias Barat	18,411,235,998	1,319,273,835	180,915,741,154
33	Kota Gunungsitoli	32,209,121,389	1,214,258,684	156,757,286,042

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 paling tinggi adalah Kota Medan sebesar Rp. 1,829,665,882,248 dan terendah adalah Kabupaten Nias Barat dimana belanja modal sebesar 18,411,235,998. Naik turunnya anggaran belanja modal dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai. Dengan kata lain, tidak sinkronnya pendapatan dengan belanja modal. Terlebih lagi rendahnya penyerapan OPD sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

Sedangkan Tingkat Kekayaan Daerah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara paling tinggi adalah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu sebesar Rp. 69,942,041,323 dan yang Terendah adalah Kabupaten Batubara sebesar Rp. 819,924,969. Penurunan Tingkat Kekayaan Daerah disebabkan oleh laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/pemerintah mengalami penurunan.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang tertinggi adalah Kota Medan yaitu Rp. 992,661,245,695 dan yang Terendah adalah Kota Sibolga sebesar Rp 81,569,259,159. Naik turunnya pendapat asli daerah dikarenakan penerimaan pajak dan daerah dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pengelolaan kota. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya penerimaan pajak dan retribusi pajak masing-masing daerah.

4.1.3 Analisis Deskriptif

Deskripsi data memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik data variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun fungsi deskripsi data adalah untuk mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi (tingkat penyimpangan penyebaran data dari masing-masing variabel), dan jumlah data yang dianalisis. Tabel 4.2 menunjukkan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

Tabel 4.4 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	99	3.22	3.32	3.2636	.01742
Tingkat Kekayaan Daerah	99	3.01	3.22	3.1096	.04787
Pendapatan Asli Daerah	99	3.16	3.34	3.2286	.03386
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 3,22, nilai maksimum sebesar 3,32 dan nilai rata rata sebesar 3,2636 dengan standar deviasi sebesar 0,01742. Variabel Tingkat Kekayaan Daerah memiliki nilai minimum sebesar 3,01, nilai maksimum sebesar 3,22, dan nilai rata rata sebesar 3,1096 dengan standar deviasi sebesar 0,04787. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 3,16, nilai maksimum sebesar 3,345, dan nilai rata rata sebesar 3.2286 dengan standar deviasi sebesar 0,03386.

4.1.4 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Berikut ini pengujian untuk menentukan apakah kedua asumsi klasik tersebut dipenuhi atau tidak, ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

4.1.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test*, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas. Dalam uji *one sample kolmogorov-smirnov test* variabel-variabel yang mempunyai *asympt. Sig (2-tailed)* di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 maka diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya (Ghozali, 2013:34).

1. Kolmogorov Smirnov

Kolmogorov Smirnov memiliki kriteria pengujian sebagai berikut :

Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti data berdistribusi tidak normal.

Jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal.

Tabel 4.5 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.2286
	Std. Deviation	.03386
	Absolute	.143
Most Extreme Differences	Positive	.143
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		1.425

Asymp. Sig. (2-tailed)	.615
------------------------	------

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai sig. Sebesar 0,615 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikansi > 0,05.

Nilai masing-masing variabel telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan dapat dilihat pada baris *Asym. Sig. (2-tailed)*. Dari baris tersebut nilai *Asym. Sig. (2-tailed)* > 0,05. Ini menunjukkan variabel berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bila $VIF > 10$ maka terdapat masalah multikolineritas yang serius.
- 2) Bila $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolineritas yang serius.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a		Keterangan
	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
1 Belanja Modal	.922	1.085	Tidak terdapat multikolinieritas
Tingkat Kekayaan Daerah	.922	1.085	Tidak terdapat multikolinieritas

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas masalah karena VIF (*Variabel Inflation Factory*) lebih kecil dari 10 yaitu pada VIF Belanja Modal 1,085 yang lebih kecil dari 10, Nilai VIF

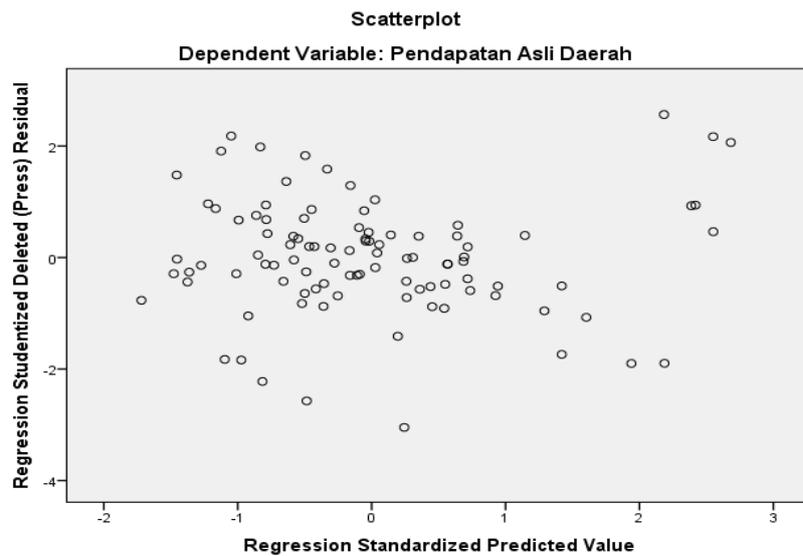
Tingkat Kekayaan daerah sebesar 1,0. Dan masing-masing variable terikat baik itu Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode informal. Metode informal dalam pengujian heteroskedastisitas yakni metode grafik Scatterplot.

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik yang menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.



Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar IV.2 memperlihatkan bulatan membentuk pola tidak teratur, dimana titik – titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas.

4.1.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah..

Maka model regresi linear berganda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$ABD = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + + e$$

Dimana :

PAD = Nilai yang di prediksi

X_1 = Belanja Modal

α = Konstanta

X_2 = Tingkat Kekayaan Daerah

b = Slope atau koefisien regresi

Tabel 4.7 Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	1.295	.382	
1 Belanja Modal	1.082	.122	.557
Tingkat Kekayaan Daerah	.319	.044	.451

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, maka persamaan regresi linear berganda diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = 1,082 + 0,319 X + e$$

Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 1,295 dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila semua variabel independent yaitu Belanja Modal (X₁), Tingkat Kekayaan Daerah (X₂), dalam bernilai nol, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019 bernilai 1,295.
- 2) Nilai Tingkat Kekayaan Daerah (X₁) sebesar 1,082. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Tingkat Kekayaan Daerah ditingkatkan 100% maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,082 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 3) Nilai Tingkat Kekayaan Daerah (X₂) sebesar 0,319. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Tingkat Kekayaan Daerah

ditingkatkan 100% maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,319 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.

4.1.4.3 Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individual, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Setelah didapat t hitung dibandingkan dengan t tabel.

Kriteria pengambilan keputusan :

- 1) H_0 diterima jika : $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$
- 2) H_0 ditolak jika : $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$

Untuk uji statistik t penulis menggunakan pengolahan data SPSS *for windows* versi 20 maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.295	.382		3.386	.001
1 Belanja Modal	1.082	.122	.557	8.891	.000
Tingkat Kekayaan Daerah	.319	.044	.451	7.198	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
 Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai perolehan uji-t untuk hubungan antara Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Belanja Modal. Nilai t_{tabel} untuk $n = 99 - 2 = 97$ adalah 1,984.

a. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Belanja Modal secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah 8,891 dan t_{tabel} sebesar 1,984. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil besar t_{tabel} ($8,891 < 1,984$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Tingkat Kekayaan Daerah secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,198 dan t_{tabel} sebesar 1,984. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($7,198 < 1,984$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 > 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Uji F (Simultan)

Uji F juga disebut dengan uji signifikan secara bersama-sama dimasukkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kriteria pengujian :

Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$

Terima H_0 apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > -F_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 20, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Uji- F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.073	2	.037	90.417	.000 ^b
	Residual	.039	96	.000		
	Total	.112	98			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Modal

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

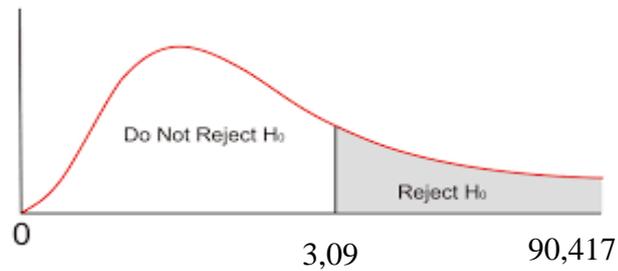
Bertujuan untuk menguji hipotesis statistik diatas, maka dilakukan uji F pada tingkat $\alpha = 5\%$. Nilai F hitung untuk $n = 99$ adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = 90,417$$

$$F_{tabel} = n-k-1 = 99-2-1= 96$$

$$F_{tabel} = 3,09$$

Nilai F_{tabel} untuk $n = 96$ adalah sebesar 3,09. Selanjutnya nilai F_{tabel} sebesar 3,09 digunakan sebagai kriteria pengambilan keputusan.



Gambar 4.2 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan pengujian F_{hitung} dan F_{tabel} . Pengaruh yaitu Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh F_{hitung} sebesar 90,417 dengan F_{tabel} sebesar 3,09 sehingga F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($90,417 > 3,09$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yaitu Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan kata lain yaitu Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah secara simultan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah secara langsung.

4.1.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (*adjusted* R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen adalah terbatas. Berikut hasil pengujian statistiknya

Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.808 ^a	.653	.646	.02015	.653	90.417	2	96	.000	1.661

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukkan nilai *R Square* adalah 0,653. Untuk mengetahui sejauh mana besaran pengaruh variabel Pengaruh yaitu Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat diketahui melalui uji koefisien determinasi seperti berikut ini :

$$\begin{aligned}
 KD &= R^2 \times 100 \% \\
 &= 0,808^2 \times 100 \% \\
 &= 65,3 \%
 \end{aligned}$$

Nilai *R-Square* diatas adalah sebesar 65,3 % hal ini berarti bahwa 65,3 % variasi nilai Pendapatan Asli Daerah ditentukan oleh peran dari variasi nilai Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah. Dengan kata lain Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah sebesar 65,3% sedangkan sisanya 34,7% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti dana alokasi khusus, pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya.

4.2 Pembahasan

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori pendapat maupun penelitian terdahulu yang dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada 3 (tiga) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatkan pendapatan asli daerah Modal diikuti dengan meningkatkan belanja modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019.

Hasil Analisis Regresi Linier berganda untuk menguji bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dari nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2019 terlihat selalu terjadi peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada masing-masing kabupaten/kota. Demikian juga halnya terjadi pada realisasi Belanja Modal selalu terjadi peningkatan Belanja Modal pada hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah

yang berfungsi sebagai salah satu sumber untuk pengeluaran daerah salah satunya yaitu Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah nilai Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara maka semakin bertambah pula nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tersebut. Dengan Belanja Modal yang tinggi, pemerintah dapat mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah semaksimal mungkin. Namun apabila Belanja Modal rendah, pemerintah akan sulit melaksanakan Pendapatan Asli Daerah yang maksimal.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2013) bahwa “Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pemerintah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menyimpulkan bahwa “Belanja modal berpengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah pemerintah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, dimana Pendapatan daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah terus meningkat dan upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah terhadap pos-pos penerimaan PAD dilakukan secara memadai. Sedangkan belanja modal menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan daerah, maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah.”

2. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah pada Pemerintah Kota di

Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Tingkat Kekayaan Daerah Berpengaruh berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Tingkat Kekayaan Daerah diikuti dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019.

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah PAD (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). Adapun pertimbangan tingkat kekayaan diukur dengan PAD karena merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari pengelolaan sumber daya pada daerah tersebut. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Darwanis & Saputra, 2014).

Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD.

Berdasarkan uji regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 20.0 terhadap 99 sampel menunjukkan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan arah pengaruhnya positif. Ini berarti bahwa semakin tinggi Hasil Tingkat Kekayaan Daerah (Laba BUMD) maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian ini setiap kenaikan 1% dari laba BUMD, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 1.000 dari pendapatan asli daerah. Pengaruh positif yang

ditunjukkan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis bahwa laba BUMD berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut Pratama et.al (2015) dan Mustikarini (2012) kekayaan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber utama pembiayaan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu dalam menggali sumber kekayaan yang ada untuk menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Menurut Julitawati et.al (2012) peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah menekankan hasil atas PAD mereka dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dengan baik. Penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Mustikarini & Debby (2012) bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka akan semakin tinggi skor kinerja daerah tersebut.

3. Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019. dari uji ANOVA (*Analysis Of Variance*). Pada tabel diatas didapat F_{hitung} sebesar 90,417 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 3,09. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($90,417 > 3,09$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019. Besarnya

pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 65,3% sedangkan sisanya 34,7% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Retnowati, 2016) menunjukkan bahwa secara simultan terdapat Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh antara Belanja Modal terhadap Pendapatn Asli daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019.
2. Ada pengaruh antara Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatn Asli daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019.
3. Ada pengaruh antara Belanja Modal dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatn Asli daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Saran yang dapat direkomendasikan adalah pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sector-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan meningkatkan pembangunan daerah dengan adanya Pajak Daerah, Hasil agar lebih mandiri

dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2. Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara kedepannya diharapkan lebih meningkatkan Tingkat Kekayaan daerahnya terhadap pendapatan asli daerah
3. Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara hendaknya mengurangi aktivitas belanja modal, dan belanja barang dan jasa dan lebih meningkatkan aktivitas belanja modalnya.
4. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevandan penambahan variabel baru sebagai variabel independen maupun variabel dependen sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah. *Procedding Simposium Nasional Akuntansi IX*, 23–26.
- Andrani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Danaperimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(3), 30–39.
- Artha, R. D., Basuki, P., & MT, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). *Jurnal InFestasi*, 11(2), 214–229.
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Universitas Dipenogoro.
- Greg, J., & Anggana, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Universitas Stikubank*, 7, 692–702.
- Mayasari, L. P. R., Sinarwati, N. K., & Yuniarta, G. A. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Ganesha*, 2(1), 11.
- Nugroho, F., & Rohman, A. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–14.
- Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 3(1), 12.
- Pratiwi, N., & Arifin, A. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Studi pada Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Periode 2014-2016. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–17.
- Retnowati, R. (2016). ... Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental

Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2), 1–15.

Retnowati, Reny. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.

Rizanda, P. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1–28.

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170.

Sudarsana, E., Setiani, O., & Suhartono. (2013). Hubungan Riwayat Pajanan Kromium Dengan Gangguan Fungsi Ginjal Pada Pekerja Pelapisan Logam di Kabupaten Tegal. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 12(1), 34–41.

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah studi empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Universitas Sebelas Maret. Surakarta*, 1–76.

Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *Jurnal InFestasi*, 11(2), 118–136.

Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(1), 88–99.

Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124–142.



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 15 November 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nurul Alam Ns Rambe*
 NPM. : 1705170060
 Tempat / Tgl.Lahir : P. Brandan, 18 Juli 1998
 Alamat Rumah : Jl. Karya Gg. Karang Sari No. 7 A
 Judul Proposal : Pengaruh Belanja Modal Daerah Dan Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I
Bab II	Tabel penelitian terdahulu, tema tidak sesuai dengan variabel Y
Bab III	1. Populasi dan sampel belum ada 2. Indikator pengukur tingkat kekayaan daerah dikaji ulang karena kemungkinan terjadi masalah pada asumsi klasik 3. Perbaiki table definisi operasional variabel
Lainnya	Perhatikan huruf capital
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 15 November 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si

Pembanding

Muhammad Fahmi, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 15 November 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Alam Ns Rambe
NPM : 1705170060
Tempat / Tgl.Lahir : P. Brandan, 18 Juli 1998
Alamat Rumah : Jl. Karya Gg. Karang Sari No. 7 A
Judul Proposal : Pengaruh Belanja Modal Daerah Dan Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 15 November 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si

Pembanding

Muhammad Fahmi, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Guhawan, SE, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2039/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/9/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 9/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurul Alam Ns Rambe
NPM : 1705170060
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi sektor publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga tingkat PAD belum mengalami peningkatan
2. Realisasi penerimaan pajak hasil pungutan retribusi dari masyarakat belum memadai dalam upaya peningkatan pendapatan daerah
3. Realisasi belanja modal daerah serta tingkat kekayaan daerah belum memadai bagi pendapatan asli daerah

Rencana Judul : 1. Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2017-2019
2. Pengaruh belanja modal daerah dan tingkat kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2017-2019
3. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Objek/Lokasi Penelitian : Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Nurul Alam Ns Rambe)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2039/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/9/2/2021

Nama Mahasiswa : Nurul Alam Ns Rambe
NPM : 1705170060
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi sektor publik
Tanggal Pengajuan Judul : 9/2/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si (17 Februari 2021)
Judul Disetujui**) : PENGARUH BELANJA MODAL DAN TINGKAT KEKAYAAN DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(studi empiris Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum SE., M.Si)

Medan, 17 Februari 2021

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si, CA)

Keterangan:

*) Disisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Disisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah diupload oleh Prodi dan Dosen pembimbing, akan foto dan upload/lati kebaruan ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 17 September 2021 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : N U R U L A L A M N S R A M B E

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 0 6 0

Tempat Tgl. Lahir : P B r a n d a n 1 8 J u l i 1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L K a r y a B g K a r a n g S
a r i

Tempat Penelitian : D J P K k e m e n k e u R I

Alamat Penelitian : J L P . D i P o n e g o r o n o 3 0
A m e d a n P o l o n i a

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Riva Umar Harahap, SE, MS)

Wassalam
(Penelitian)

(Nurul Alam NS Rambe...)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ke luar di subotkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2230/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 17 Februari 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nurul Alam Ns Rambe
N P M : 1705170060
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Belanja Modal Daerah dan Tingkat Kekayaan Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : **Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **17 September 2022**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Shafar 1443 H
17 September 2021 M



C.c.File



Dekan

Dr. Januri, SE., MM., M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam surat ini, mohon maaf dan terimakasih.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6623474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : / IL3 - AU/UMSU - 05/F/2022

Medan, 07 Ramadhan 1443 H
08 April 2022 M

Lamp : -

Hai : Undangan Pelaksanaan Ujian Skripsi

Kepada Yth, Sdr. Pembimbing Skripsi :
Assoc.Prof.Dr.Hj. Maya Sari, SE.,M.Si.,AK.,CA

Di-

Medan,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatu

Ba'dassalam, sehubungan dengan ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir dalam pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Nurul Alam Ns Rambe
Nomor Pokok Mahasiswa : 1705170060
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal Daerah dan Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara
Pembimbing : Assoc.Prof.Dr.Hj. Maya Sari, SE.,M.Si.,AK.,CA

Ditujukan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 08 April 2022
Waktu : 08.30 WIB Sampai Selesai
Tempat : Ruang Sidang Lt. II Gedung E.

Demikian undangan ujian meja hijau ini kami sampaikan, kehadiran saudara sangat menentukan sukses tidaknya pelaksanaan ujian bimbingan saudara, atas perhatian dan kerja samanya serta hadir tepat waktu diucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarakatu

a.n Dekan
Wakil Dekan - I



Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

Tembusan : Peserta Ujian Skripsi
Sdr. Nurul Alam Ns Rambe



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :1795/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Nurul Alam Ns Rambe
NPM : 1705170060
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 10 Shafar 1443 H.
17 September 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd